

# Penguatan Perspektif Seks dan Gender dalam Implementasi Kebijakan Publik melalui Peran Pekerja Sosial

*Strengthening Sex and Gender Perspectives in Public Policy Implementation: The Role of Social Workers*

**Abd. Naris Agam**

Universitas Teknologi Sulawesi, Makassar, Indonesia

[narissarbat86@gmail.com](mailto:narissarbat86@gmail.com) (Primary Contact)

---

## ABSTRACT

This study examines social workers' understanding of the concepts of sex and gender, their role in integrating gender perspectives into public policy implementation in the social sector, and the challenges and strategies for strengthening gender-responsive practice. The research uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving ten informants consisting of social workers, program coordinators, and community members involved in social service programs. Data were analyzed using an interactive model including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that social workers generally understand the distinction between sex and gender, although the depth of understanding varies. Social workers play important roles as facilitators, advocates, and agents of social change in promoting gender equality within public policy implementation. However, challenges remain, including limited gender awareness, strong patriarchal norms, and insufficient gender-related training. Strengthening gender perspectives requires capacity building, community empowerment, and stronger collaboration between government, social workers, and civil society. The study concludes that effective gender-responsive policy implementation depends on the active role of social workers at the community level.

### Keywords

Social work; gender perspective; public policy; gender equality; social welfare

### Article History

Received: 2026-03-07  
Accepted: 2026-03-15

---

Copyright © 2026, Agam, A. N.  
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru  
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.447](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.447)

---

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan publik di bidang sosial memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial, tetapi juga untuk menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan publik. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam mengatur distribusi sumber daya, pelayanan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Dalam implementasinya, kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan publik adalah persoalan ketimpangan gender. Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi akses individu terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu, integrasi perspektif seks dan gender dalam kebijakan publik menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif.

Dalam kajian ilmu sosial, konsep seks dan gender memiliki makna yang berbeda. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati, sedangkan gender berkaitan dengan peran, tanggung jawab, serta hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui konstruksi sosial dan budaya. Perspektif gender menunjukkan bahwa berbagai ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat seringkali bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, melainkan oleh konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang tidak setara. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran Judith Butler yang menjelaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan terbentuk melalui praktik sosial dan budaya yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, perspektif gender menjadi pendekatan yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan mampu mempertimbangkan kebutuhan serta pengalaman yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah kebijakan responsif gender, yaitu kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat. Dengan demikian, integrasi perspektif gender dalam implementasi kebijakan publik menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat netral secara administratif, tetapi juga mampu mengurangi berbagai bentuk ketimpangan sosial yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan publik di bidang sosial tidak terlepas dari peran berbagai profesi yang bekerja secara langsung dengan masyarakat, salah satunya adalah pekerja sosial. Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat melalui intervensi sosial yang terencana. Menurut pemikiran Addams, pekerjaan sosial memiliki tujuan utama untuk memperjuangkan keadilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok yang mengalami ketidakberdayaan dan marginalisasi. Sebagai profesi yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, pekerja sosial dituntut untuk memiliki sensitivitas terhadap berbagai bentuk ketimpangan yang terjadi di masyarakat, termasuk ketimpangan berbasis gender. Dalam praktik pekerjaan sosial, pemahaman mengenai konsep seks dan gender menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Pengetahuan tersebut memungkinkan pekerja sosial untuk memahami berbagai dinamika sosial yang berkaitan dengan relasi gender serta mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi maupun ketidakadilan yang dialami oleh kelompok tertentu.

Dalam perkembangan teori pekerjaan sosial modern, profesi pekerja sosial ini dipandang sebagai suatu sistem praktik yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan,

pengetahuan ilmiah, serta keterampilan profesional dalam membantu individu dan masyarakat. Pekerja sosial memiliki berbagai peran penting, seperti fasilitator, mediator, advokat, dan agen perubahan sosial. Sebagai fasilitator, pekerja sosial membantu individu maupun kelompok untuk mengakses sumber daya yang tersedia dalam masyarakat. Sebagai mediator, pekerja sosial membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara individu, kelompok, atau institusi. Sementara itu, sebagai advokat, pekerja sosial memperjuangkan hak-hak kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat.

Dalam konteks kebijakan sosial, pekerja sosial juga berperan dalam menjembatani hubungan antara kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat. Pekerja sosial seringkali menjadi aktor yang berada di garis depan dalam implementasi berbagai program sosial yang dirancang oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sosial masyarakat sangat diperlukan agar pekerja sosial mampu menjalankan perannya secara efektif. Selain itu, nilai dasar pekerjaan sosial juga menekankan pentingnya prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penghargaan terhadap keberagaman. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi pekerja sosial dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial yang kompleks, termasuk isu ketimpangan gender yang masih banyak ditemukan dalam masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya integrasi perspektif seks dan gender dalam implementasi kebijakan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat berupa keterbatasan pemahaman mengenai konsep gender di kalangan praktisi, kurangnya pelatihan atau penguatan kapasitas terkait pendekatan responsif gender, serta kuatnya nilai-nilai budaya patriarkal yang masih memengaruhi struktur sosial masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan kebijakan yang telah dirancang dengan baik belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Di sisi lain, pekerja sosial memiliki posisi strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan publik yang responsif gender. Melalui praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami hak-haknya, sebagai advokat yang memperjuangkan kepentingan kelompok rentan, serta sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terciptanya sistem sosial yang lebih adil dan inklusif. Dengan pemahaman yang baik mengenai perspektif seks dan gender, pekerja sosial dapat membantu memastikan bahwa kebijakan publik di bidang sosial benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kajian ilmu sosial, konsep seks dan gender merupakan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda meskipun seringkali digunakan secara bersamaan. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati dan tidak dapat diubah, seperti perbedaan organ reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan identitas sosial yang dibentuk oleh konstruksi budaya dan sosial dalam masyarakat.

Kajian mengenai gender menunjukkan bahwa berbagai ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan seringkali tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Peran gender yang dibentuk oleh budaya dapat memengaruhi akses individu terhadap pendidikan, pekerjaan, kekuasaan, dan sumber daya lainnya. Salah satu tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan teori gender adalah Judith Butler. Dalam pemikirannya, Butler menjelaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat tetap atau alami, melainkan

terbentuk melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini dikenal dengan istilah *gender performativity*, yang menekankan bahwa identitas gender dibentuk melalui tindakan sosial dan budaya yang terus-menerus. Pemahaman mengenai konsep gender menjadi sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam kebijakan publik dan praktik pekerjaan sosial. Tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai gender, berbagai program sosial yang dirancang oleh pemerintah berpotensi mengabaikan kebutuhan kelompok tertentu, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas isu gender dalam kebijakan publik maupun pekerjaan sosial, sebagian besar kajian tersebut lebih banyak menyoroti aspek perumusan kebijakan atau analisis ketimpangan gender secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana perspektif seks dan gender diintegrasikan secara langsung dalam implementasi kebijakan melalui praktik pekerja sosial di lapangan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penguatan perspektif seks dan gender dalam kebijakan publik melalui praktik pekerjaan sosial menjadi suatu isu yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana pemahaman pekerja sosial mengenai konsep seks dan gender dalam praktik pekerjaan sosial, bagaimana peran pekerja sosial dalam mengintegrasikan perspektif tersebut dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang sosial, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam memperkuat perspektif seks dan gender dalam kebijakan publik melalui praktik pekerjaan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial yang lebih responsif gender serta menjadi masukan bagi penguatan implementasi kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan pemahaman pekerja sosial mengenai konsep seks dan gender serta perannya dalam memperkuat perspektif gender dalam kebijakan publik di bidang sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali pengalaman, pemahaman, serta pandangan para pekerja sosial dalam menjalankan praktik profesionalnya. Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam pelaksanaan program pelayanan sosial. Penelitian ini melibatkan 10 informan yang terdiri atas pekerja sosial profesional, koordinator program layanan sosial, serta masyarakat penerima layanan yang memiliki pengalaman terkait program berbasis perspektif gender. Kriteria pemilihan informan meliputi: memiliki pengalaman dalam praktik pekerjaan sosial, terlibat dalam pelaksanaan program sosial yang berkaitan dengan isu gender, serta bersedia memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi selama periode penelitian kurang lebih tiga bulan. Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik validasi data melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, serta *member check*, yaitu dengan melakukan konfirmasi kembali kepada informan terhadap hasil wawancara yang telah diperoleh. Teknik tersebut digunakan untuk memastikan

bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan dan konsistensi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan pada Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa lembaga yang memiliki keterkaitan dengan praktik pekerjaan sosial dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang sosial di Kota Ambon, Provinsi Maluku, seperti Dinas Sosial Kota Ambon, lembaga kesejahteraan sosial, serta organisasi masyarakat yang bergerak dalam pelayanan sosial. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga-lembaga tersebut secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan program pelayanan sosial dan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan sosial yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi program sosial yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan isu-isu sosial, termasuk isu kesetaraan gender. Lokasi penelitian dipilih karena dianggap relevan untuk menggali informasi mengenai bagaimana pekerja sosial memahami konsep seks dan gender serta bagaimana perspektif tersebut diintegrasikan dalam praktik pekerjaan sosial dan pelaksanaan kebijakan publik di bidang sosial.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pemahaman pekerja sosial mengenai konsep seks dan gender dalam praktik pekerjaan sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sosial pada umumnya memiliki pemahaman dasar mengenai perbedaan antara konsep seks dan gender. Sebagian besar informan menyatakan bahwa seks berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender berkaitan dengan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, "*seks itu berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender lebih kepada peran yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya.*" Pemahaman tersebut menurut para informan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan profesi, maupun pengalaman kerja di lapangan.

Meskipun demikian, tingkat pemahaman informan mengenai konsep gender masih bervariasi. Beberapa pekerja sosial mampu menjelaskan konsep gender secara lebih komprehensif serta memahami bagaimana konstruksi sosial memengaruhi relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Seorang informan menyatakan bahwa "*gender itu bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang bagaimana budaya membentuk peran dan kadang menimbulkan ketimpangan.*" Namun, terdapat pula informan yang masih memahami gender secara sederhana sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan tanpa mengaitkannya dengan relasi kekuasaan, norma budaya, maupun ketimpangan sosial yang lebih luas.

Dalam praktik pekerjaan sosial, pemahaman mengenai konsep seks dan gender dianggap penting oleh para informan karena membantu mereka memahami kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, serta kelompok yang mengalami diskriminasi sosial. Salah satu informan menjelaskan bahwa "*dengan memahami gender, kami bisa melihat masalah yang dihadapi perempuan atau kelompok rentan secara lebih jelas dan menentukan bentuk pendampingan yang tepat.*"

Dengan demikian, perspektif gender membantu pekerja sosial menjadi lebih peka terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Namun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa pemahaman mengenai gender belum sepenuhnya diintegrasikan secara sistematis dalam praktik pekerjaan sosial. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan khusus mengenai pendekatan gender dalam pelayanan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh informan lain, *“pelatihan tentang gender masih terbatas, sehingga dalam praktik di lapangan kami sering belajar dari pengalaman sendiri.”* Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pekerja sosial melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait perspektif gender masih menjadi kebutuhan penting dalam praktik pekerjaan sosial.

### **3.2. Peran pekerja sosial dalam mengintegrasikan perspektif seks dan gender dalam pelaksanaan kebijakan publik**

Berdasarkan hasil penelitian, pekerja sosial memiliki peran penting dalam mengintegrasikan perspektif seks dan gender dalam implementasi kebijakan publik di bidang sosial. Peran tersebut terlihat dalam berbagai bentuk praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh para informan di lapangan. Salah satu informan menyatakan bahwa *“dalam menjalankan program sosial, kami berusaha memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam mengakses layanan yang disediakan pemerintah.”*

Salah satu peran utama pekerja sosial adalah sebagai fasilitator, yaitu membantu masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pelayanan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Dalam menjalankan peran ini, pekerja sosial berupaya memastikan bahwa kelompok masyarakat yang rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, dapat memperoleh akses yang setara terhadap layanan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan, *“kami membantu masyarakat memahami prosedur layanan sosial dan memastikan mereka bisa mengakses program bantuan yang tersedia.”* Selain itu, pekerja sosial juga berperan sebagai advokat yang memperjuangkan hak-hak kelompok yang mengalami ketidakadilan sosial. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka sering memberikan pendampingan kepada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau diskriminasi sosial. Salah satu informan menjelaskan bahwa *“ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan, kami biasanya melakukan pendampingan dan membantu korban untuk mendapatkan perlindungan hukum serta layanan sosial yang dibutuhkan.”*

Pekerja sosial juga berperan sebagai agen perubahan sosial dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Kegiatan edukasi tersebut dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti penyuluhan sosial, pelatihan keterampilan, serta kegiatan pemberdayaan perempuan. Seorang informan menyampaikan bahwa *“melalui kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan, kami mencoba mengubah cara pandang masyarakat agar lebih menghargai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.”* Melalui berbagai peran tersebut, pekerja sosial secara tidak langsung turut berkontribusi dalam memperkuat implementasi kebijakan publik yang responsif terhadap isu gender.

### **3.3. Tantangan yang dihadapi pekerja sosial dalam memperkuat perspektif seks dan gender dalam implementasi kebijakan publik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam upaya memperkuat perspektif seks dan gender dalam implementasi kebijakan publik. Salah satu informan menyampaikan bahwa *“dalam praktik di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara seks dan gender sehingga sering muncul kesalahpahaman dalam melihat isu kesetaraan.”*

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai isu gender. Beberapa informan menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pandangan tradisional mengenai peran laki-laki dan perempuan. Pandangan tersebut seringkali menghambat upaya pekerja sosial dalam mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat. Seorang informan menyatakan bahwa *“masih ada anggapan bahwa perempuan hanya berperan di ranah domestik, sehingga program pemberdayaan perempuan kadang tidak langsung diterima oleh masyarakat.”* Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas dan pelatihan bagi pekerja sosial terkait pendekatan responsif gender. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan pelatihan khusus yang membahas secara mendalam mengenai integrasi perspektif gender dalam praktik pekerjaan sosial. Salah satu informan mengungkapkan bahwa *“kami sering belajar dari pengalaman di lapangan karena pelatihan khusus tentang pendekatan gender dalam pekerjaan sosial masih sangat terbatas.”*

Selain itu, faktor budaya dan norma sosial yang patriarkal juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program yang berorientasi pada kesetaraan gender. Dalam beberapa kasus, pekerja sosial menghadapi resistensi dari masyarakat ketika mencoba memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif dan setara dalam relasi gender. Seorang informan menjelaskan bahwa *“ketika kami mencoba memperkenalkan program yang mendorong kesetaraan gender, kadang ada penolakan karena dianggap bertentangan dengan kebiasaan yang sudah lama berlaku.”* Tantangan lain yang juga diidentifikasi adalah keterbatasan dukungan kebijakan dan sumber daya dalam pelaksanaan program sosial yang berperspektif gender. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program serta membatasi ruang gerak pekerja sosial dalam menjalankan perannya secara optimal. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, *“dukungan program dan anggaran untuk kegiatan yang secara khusus berfokus pada isu gender masih belum memadai, sehingga pelaksanaannya sering bergantung pada inisiatif masing-masing lembaga.”*

### **3.4. Strategi penguatan perspektif seks dan gender dalam kebijakan publik melalui praktik pekerjaan sosial**

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat perspektif seks dan gender dalam kebijakan publik melalui praktik pekerjaan sosial. Salah satu informan menyampaikan bahwa *“pekerja sosial perlu dibekali pelatihan khusus tentang gender agar mampu memahami dan menerapkannya dalam praktik pelayanan sosial.”* Oleh karena itu, strategi pertama adalah peningkatan kapasitas pekerja sosial melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perspektif gender. Pelatihan tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman pekerja sosial mengenai konsep gender serta cara mengintegrasikan perspektif tersebut dalam praktik pekerjaan sosial. Strategi kedua adalah penguatan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kesetaraan gender. Program pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi, penyuluhan

sosial, serta pelatihan keterampilan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Seorang informan menjelaskan bahwa *“kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan bagi perempuan dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.”*

Strategi ketiga adalah penguatan kolaborasi antara pekerja sosial, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang responsif gender. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan bahwa berbagai program sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, *“kerja sama antara pemerintah, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat sangat penting agar program yang berkaitan dengan kesetaraan gender dapat berjalan lebih optimal.”* Strategi keempat adalah penguatan advokasi kebijakan publik yang responsif gender. Pekerja sosial dapat berperan dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan berdasarkan pengalaman mereka dalam bekerja secara langsung dengan masyarakat. Seorang informan menyatakan bahwa *“pengalaman pekerja sosial di lapangan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.”*

Melalui berbagai strategi tersebut, diharapkan perspektif seks dan gender dapat diintegrasikan secara lebih kuat dalam implementasi kebijakan publik di bidang sosial, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pekerja sosial mengenai konsep seks dan gender, peran mereka dalam mengintegrasikan perspektif tersebut dalam kebijakan publik di bidang sosial, serta tantangan dan strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat perspektif gender dalam praktik pekerjaan sosial. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pekerja sosial pada umumnya telah memiliki pemahaman dasar mengenai perbedaan antara seks dan gender. Seks dipahami sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab yang dibentuk oleh norma dan budaya masyarakat. Namun demikian, tingkat pemahaman pekerja sosial terhadap konsep gender masih bervariasi. Sebagian pekerja sosial telah memahami konsep gender secara lebih komprehensif, sementara sebagian lainnya masih memaknai gender secara sederhana sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, pekerja sosial memiliki peran penting dalam mengintegrasikan perspektif seks dan gender dalam implementasi kebijakan publik di bidang sosial. Peran tersebut terlihat melalui berbagai fungsi profesional yang dijalankan oleh pekerja sosial, seperti sebagai fasilitator, advokat, dan agen perubahan sosial. Dalam praktiknya, pekerja sosial membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan sosial, memberikan pendampingan kepada kelompok rentan, serta melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender. Ketiga, dalam upaya memperkuat perspektif seks dan gender dalam implementasi kebijakan publik, pekerja sosial menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain masih kuatnya norma budaya patriarkal dalam

masyarakat, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai isu gender, serta keterbatasan kapasitas dan pelatihan bagi pekerja sosial terkait pendekatan responsif gender. Selain itu, keterbatasan dukungan kebijakan dan sumber daya juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program sosial yang berorientasi pada kesetaraan gender.

Keempat, untuk memperkuat perspektif seks dan gender dalam kebijakan publik melalui praktik pekerjaan sosial diperlukan beberapa strategi, di antaranya peningkatan kapasitas pekerja sosial melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perspektif gender, penguatan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kesetaraan gender, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan program sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. S., Marzuki, M., Suyato, S., & Arpanudin, I. (2024). Women in gender equality movement: A systematic literature review. *Frontiers in Sociology*, 9, 1432383. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1432383>
- Caywood, K., & Darmstadt, G. L. (2024). Gender mainstreaming at 25 years: Toward an inclusive, collaborative, and structured research agenda. *Journal of Global Health*, 14, 04011.
- Conley, H., & Koskinen Sandberg, P. (Eds.). (2023). *Handbook on gender and public sector employment*. Edward Elgar Publishing.
- Forsman, R. L., & Erwin, J. (2024). The interaction of gender identity and sexual assault on campus. *Journal of Social Work and Welfare Policy*, 2(1).
- Martin, J. (2025). Social work education leadership and gender inequality in Australia. *The British Journal of Social Work*. Advance online publication.
- Miralles-Cardona, C., Esteve-Faubel, J. M., Villegas-Castrillo, E., Suriá-Martínez, R., & Cardona-Moltó, M. C. (2025). Gender mainstreaming in social work education: Linking faculty practice, student self-efficacy, and institutional climate. *Social Sciences*, 14(12), 715.
- Munté-Pascual, A., Matulič-Domandžič, M. V., López de Aguilera, A., Aiello, E., Elboj, C., Valero, D., & Melgar, P. (2024). Asserting the visibility of social work in science. *Frontiers in Sociology*.
- OECD. (2023). *SIGI 2023 global report: Gender equality in times of crisis*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Toolkit for mainstreaming and implementing gender equality*. OECD Publishing.
- Parejo, V. H., & Radulović, B. (2023). Public policies on gender equality. In *Springer textbooks in law*. Springer.
- Rimbawan, I. P. D., & Nurhaeni, A. (2024). Gender equality, disability and social inclusion approach to disaster management policy. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), 169–192.
- Yamin, A. E. (2020). *When misfortune becomes injustice: Evolving human rights struggles for health and social equality*. Stanford University Press.